

# **HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2021**

**Divisi Hukum dan Monitoring  
Peradilan.**



# LATAR BELAKANG

Meski telah dilabeli sebagai *extra-ordinary crime*, upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah masih belum dilakukan secara serius



## ***Corruption Perception Index 2020***

Peringkat	Skor
<b>102/180</b>	<b>37/100</b>



## ***Rule Of Law Index 2020***

Peringkat	Skor
<b>92/128</b>	<b>0.39</b>



# LATAR BELAKANG

- Dalam aspek keterbukaan informasi, APH belum transparan dan akuntabel mengenai informasi dalam proses penyidikan
- Kepolisian dan Kejaksaan yang cenderung tertutup, sedangkan KPK cukup informatif.
- Pengawasan dapat dilakukan sejak proses penyidikan setelah adanya penetapan tersangka



# LATAR BELAKANG



Kasus

Rp juta/kasus

Kasus

Rp juta/kasus

Kasus

Rp juta/kasus

**Nasional**

25

217,8

40

155,1

120

138,3

**Provinsi**

2-47

116-1.388

1

129,8

**NA**

**Kab/Kota**

1-75

4,1-640

1

129,8



**Total anggaran yang dialokasikan untuk penindakan kasus korupsi (penyelidikan/penyidikan) oleh APH**

**RP382,8 MILIAR**

Sumber: Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kepolisian, Kejaksaan, KPK Tahun 2021



# TUJUAN

1. Memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi semester I yaitu dalam rentan waktu Januari sampai dengan Juni 2021;
2. Membandingkan tren penindakan kasus korupsi di semester I Tahun 2021 dengan 5 (lima) tahun pada semester sebelumnya;
3. Melakukan pemetaan terhadap pola korupsi yang terjadi selama semester I Tahun 2021 sehingga pemerintah dapat mengambil upaya strategis untuk mencegah korupsi;
4. Mendorong transparansi data penindakan kasus korupsi di APH;
5. Menilai kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH selama semester I Tahun 2021



# METODE

- Tabulasi data;
  - Data informasi berasal dari media dan/atau situs resmi penegak hukum dan/atau mengirimkan surat permohonan informasi mengenai penanganan kasus korupsi ke APH;
  - Periode pemantauan: 1 Januari – 30 Juni 2021;
- Olah data;
- Penilaian Kinerja APH didasarkan pada DIPA TA 2021
- Data komprasi;
- Analisis deskriptif.



**Target penindakan kasus korupsi oleh APH dalam Semester I tahun 2021 berdasarkan DIPA TA 2021**

**1109 kasus korupsi\***

Selama tahun 2021, target penindakan APH adalah 2217 kasus



# PENILAIAN KINERJA PENINDAKAN KASUS KORUPSI

$$\frac{\text{Penindakan kasus yang terpantau}}{\text{Target penindakan kasus}} \times 100\% = \% \text{ kasus yang ditangani}$$

<b>No</b>	<b>% Kasus yang ditangani</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	81-100	<b>A</b>	Sangat baik
<b>2</b>	61-80	<b>B</b>	Baik
<b>3</b>	41-80	<b>C</b>	Cukup
<b>4</b>	21-40	<b>D</b>	Buruk
<b>5</b>	0-20	<b>E</b>	Sangat buruk

Persentase dihitung berdasarkan kasus korupsi yang terpantau oleh ICW dan dibandingkan dengan target penindakan kasus korupsi selama semester I tahun 2021.



# TEMUAN UMUM

Kasus



Tersangka Kerugian Negara



Suap



Pungutan Liar



**209 Kasus 482 Tersangka Rp26,830 Triliun Rp96 Miliar Rp2,5 Miliar**



# TEMUAN UMUM

Dari 209 kasus:

- 188 kasus baru atau 89,6% ;
- 17 pengembangan kasus atau 8,5% ; dan
- 4 Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau 1,9%

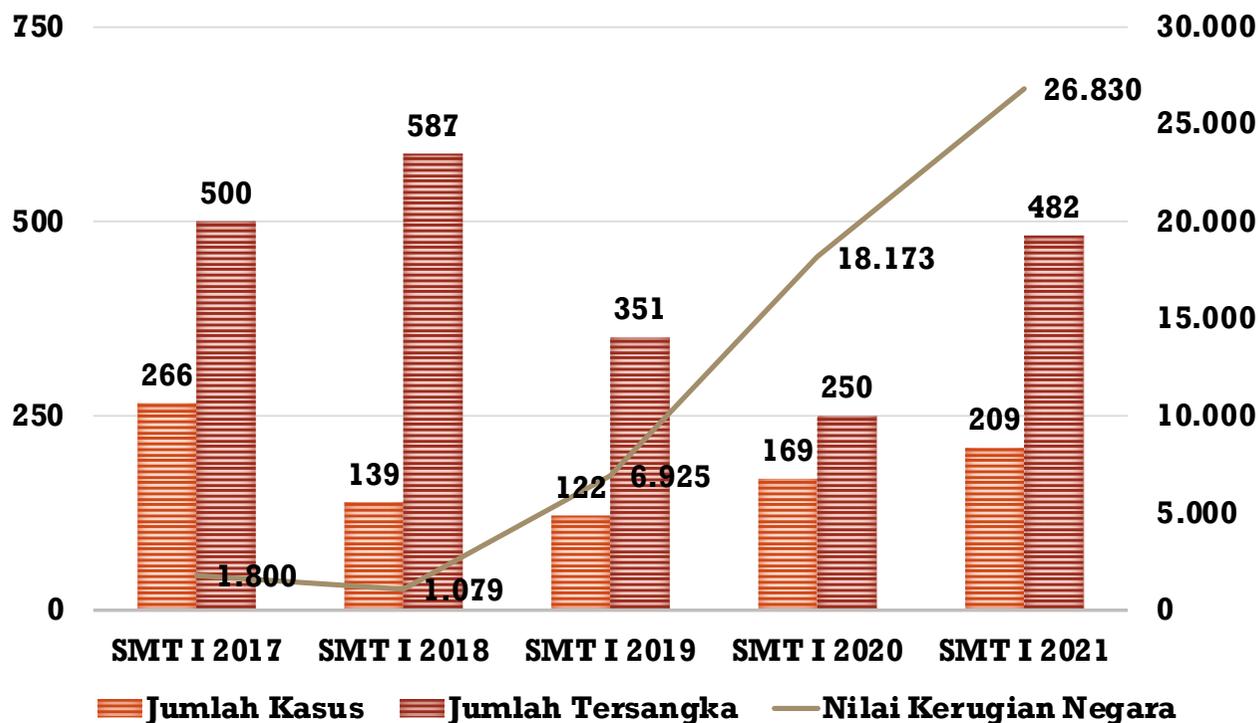


**KINERJA PENINDAKAN KASUS KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUSI  
PENEGAK HUKUM SEPANJANG SEMESTER I TAHUN 2021 HANYA MENCAPAI  
19 PERSEN DAN BERADA PADA PERINGKAT:**

**E**



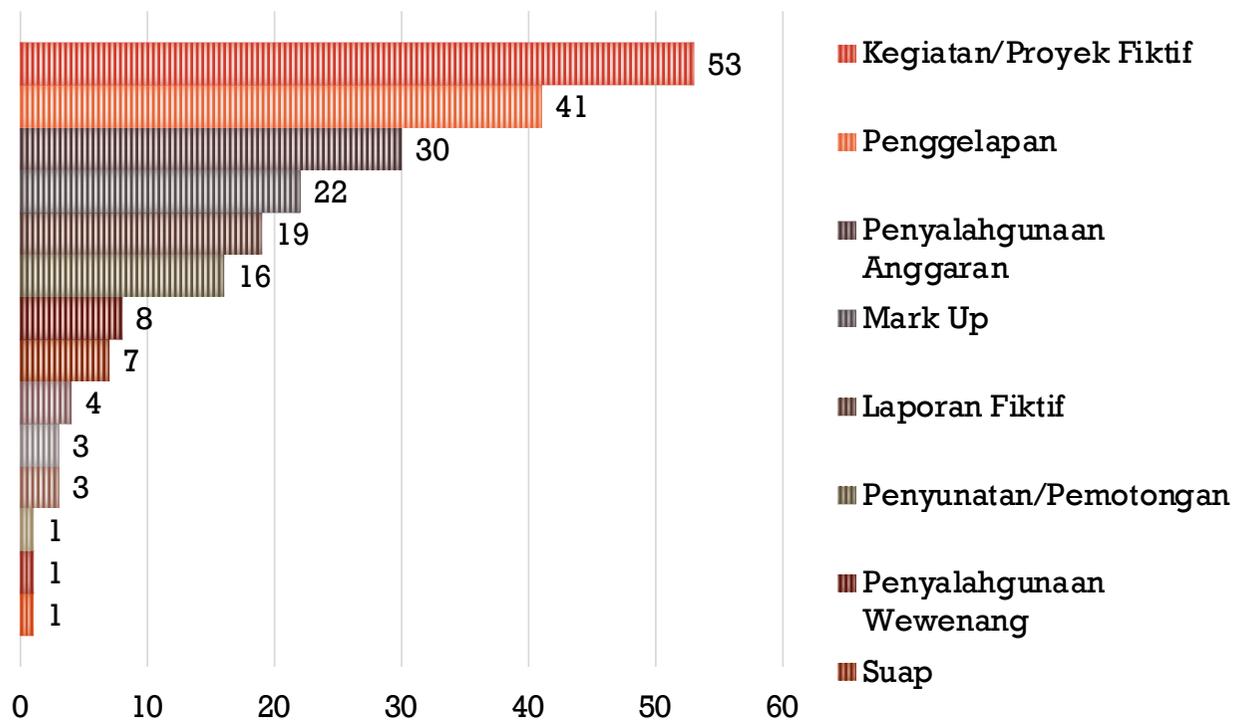
# TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2017-2021



- Penindakan kasus korupsi oleh APH sejak semester I 2017 hingga semester I 2021 cenderung fluktuatif;
- Sedangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, trennya cenderung meningkat;
- Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.



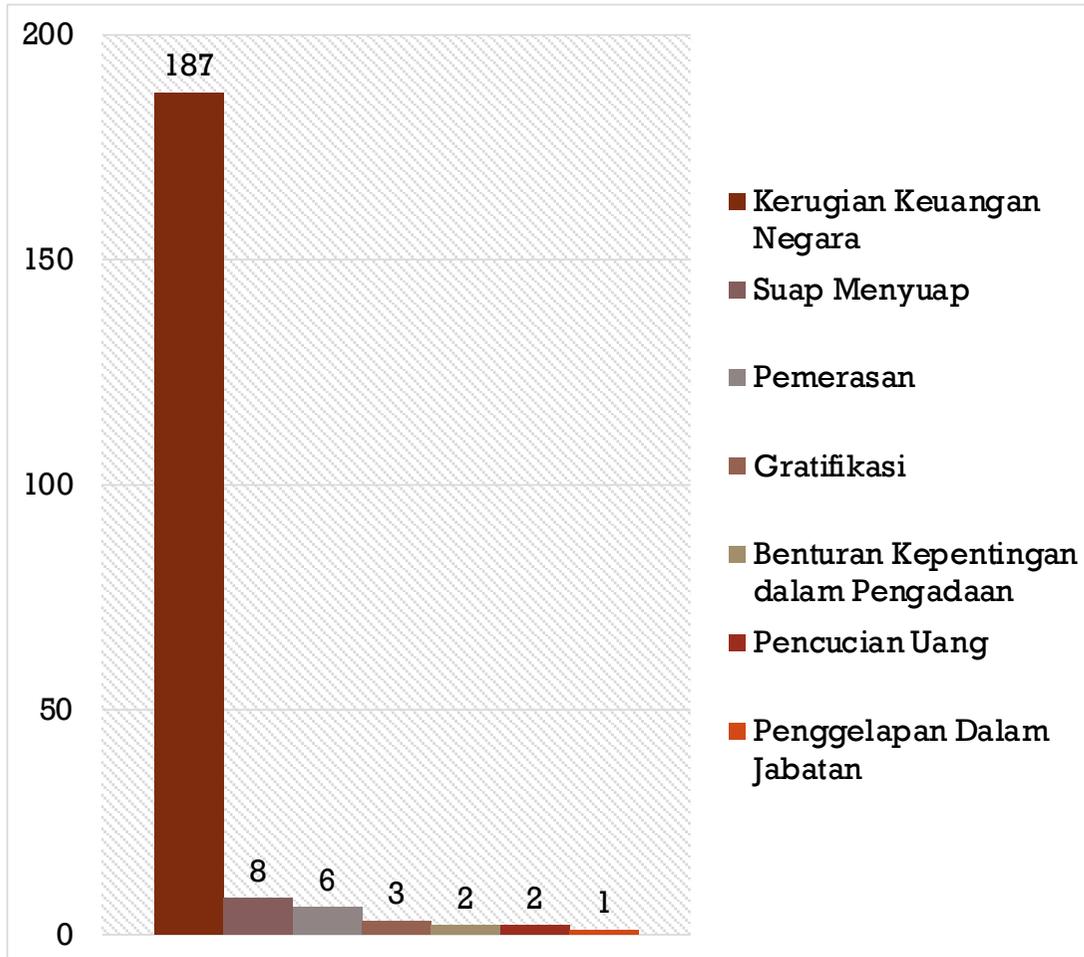
# PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN MODUS PADA SEMESTER I TAHUN 2021



- Kegiatan/Proyek Fiktif merupakan modus yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi;
- Modus lainnya yang sering digunakan adalah penggelapan, penyalahgunaan anggaran, dan *mark up*;
- Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah



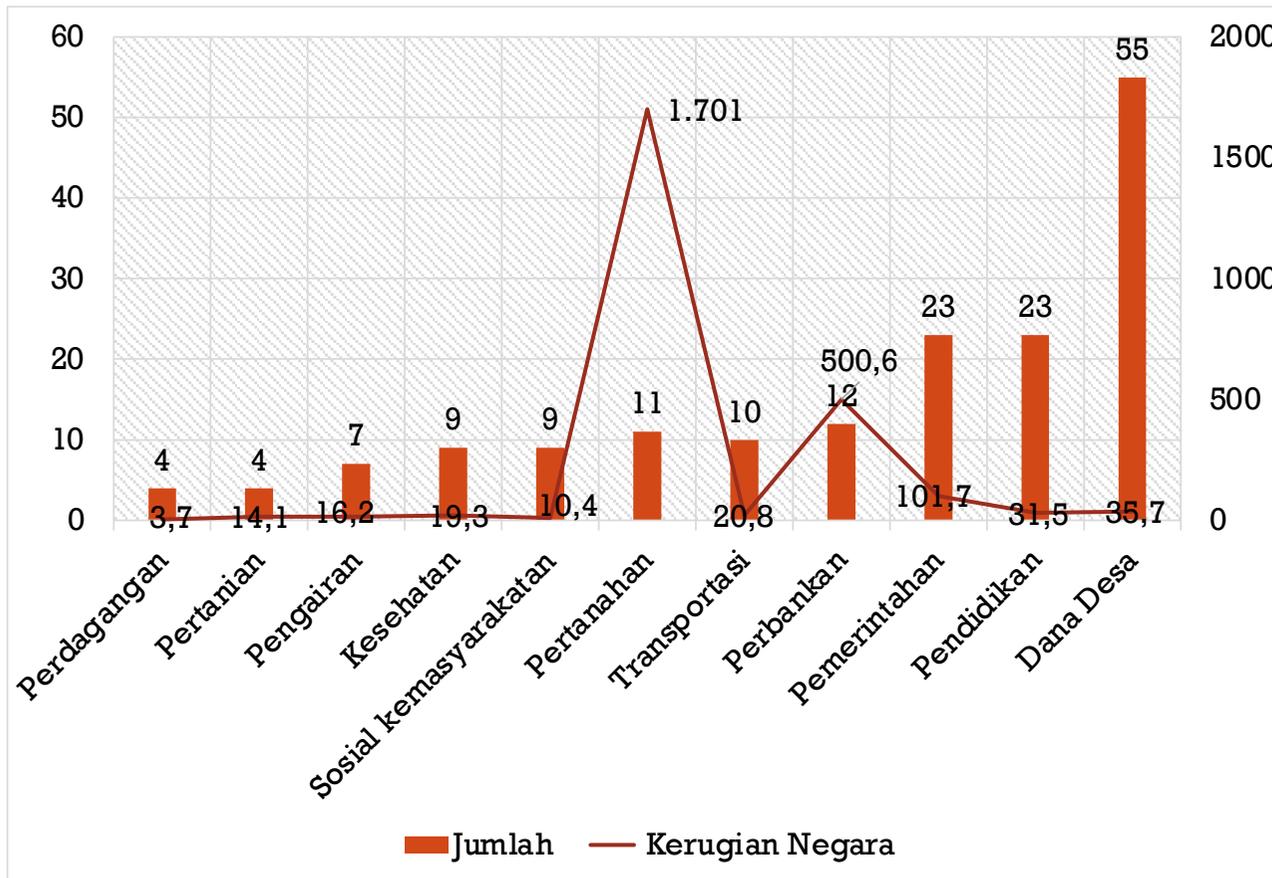
# PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN JENIS KORUPSI PADA SEMESTER I TAHUN 2021



- Dalam praktiknya, APH lebih sering menggunakan instrumen pasal 2 dan pasal 3 untuk menjerat pelaku;
- Institusi penegak hukum tidak memiliki visi dalam upaya untuk merampas aset pelaku korupsi. Hal ini dapat dilihat di mana dalam tahap penyidikan, hanya 2 (dua) kasus yang dikenakan pencucian uang yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan
- Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya penegak hukum untuk lebih progresif dalam mengejar pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini juga tidak didukung upaya pemerintah yang tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset



# PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR PADA SEMESTER I TAHUN 2021 (TOP 10)



- Pada semester I 2021, anggaran dana desa menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi ;
- Pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2021 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 72 triliun
- Sektor pelayanan publik juga menjadi sektor yang paling terjadi korupsi, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan.
- Sementara nilai kerugian negara yang paling besar ada pada sektor pertanahan.



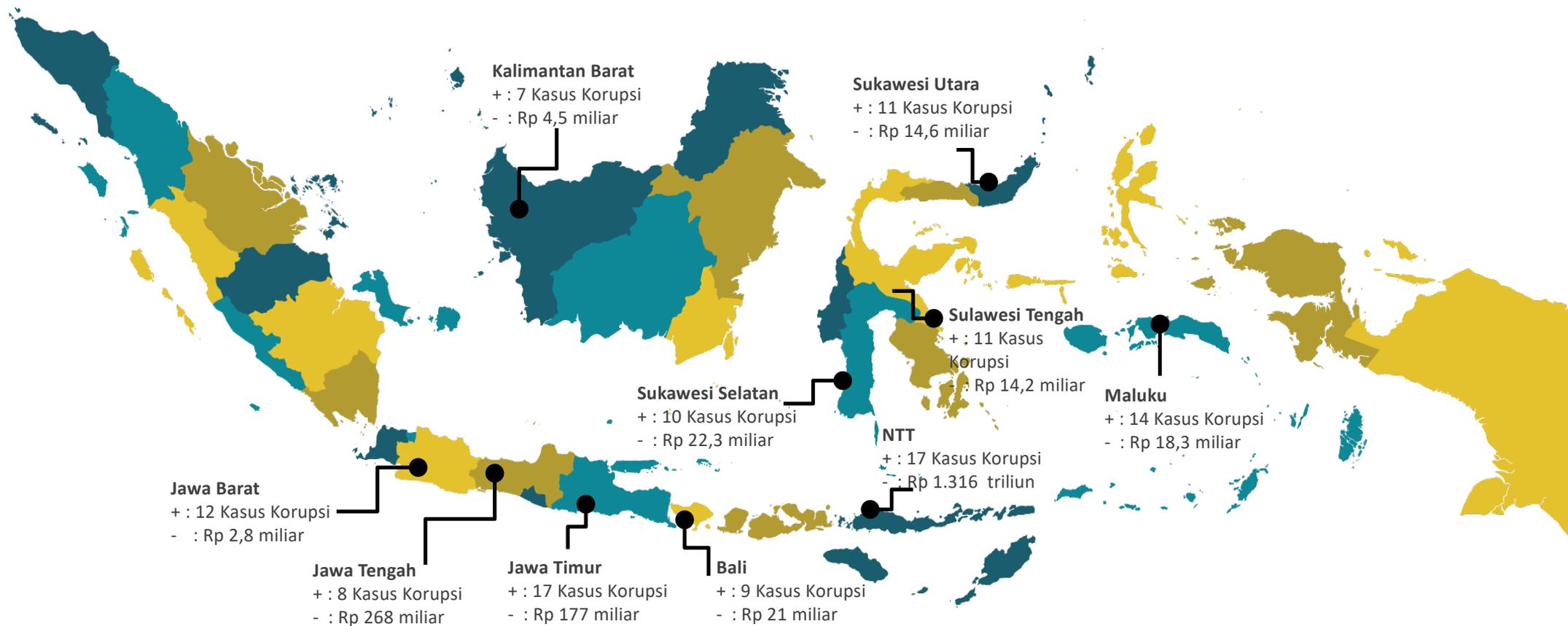
# **PENINDAKAN KASUS PENYALAHGUNAAN ANGGARAN COVID-19**

Tercatat selama semester I tahun 2021, penyalahgunaan anggaran untuk penanggulangan covid hanya ada 5 (lima) kasus

- Kasus dugaan korupsi pengadaan 15.000 masker di provinsi Banten yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1,6 Miliar ;
- Kasus dugaan korupsi pengadaan alat darurat di Bandung Barat yang melibatkan AA Umbara, Bupati Bandung Barat;
- Kasus dugaan pemotongan dana bansos di desa Cipinang, Kabupaten Bogor;
- Kasus dugaan pemotongan BLT di Desa Totok, Sumba Barat Daya, NTT;
- Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran covid di Kabupaten Mamberamo Raya yang melibatkan Dorinus Dasinapa, Bupati Mamberamo Raya.



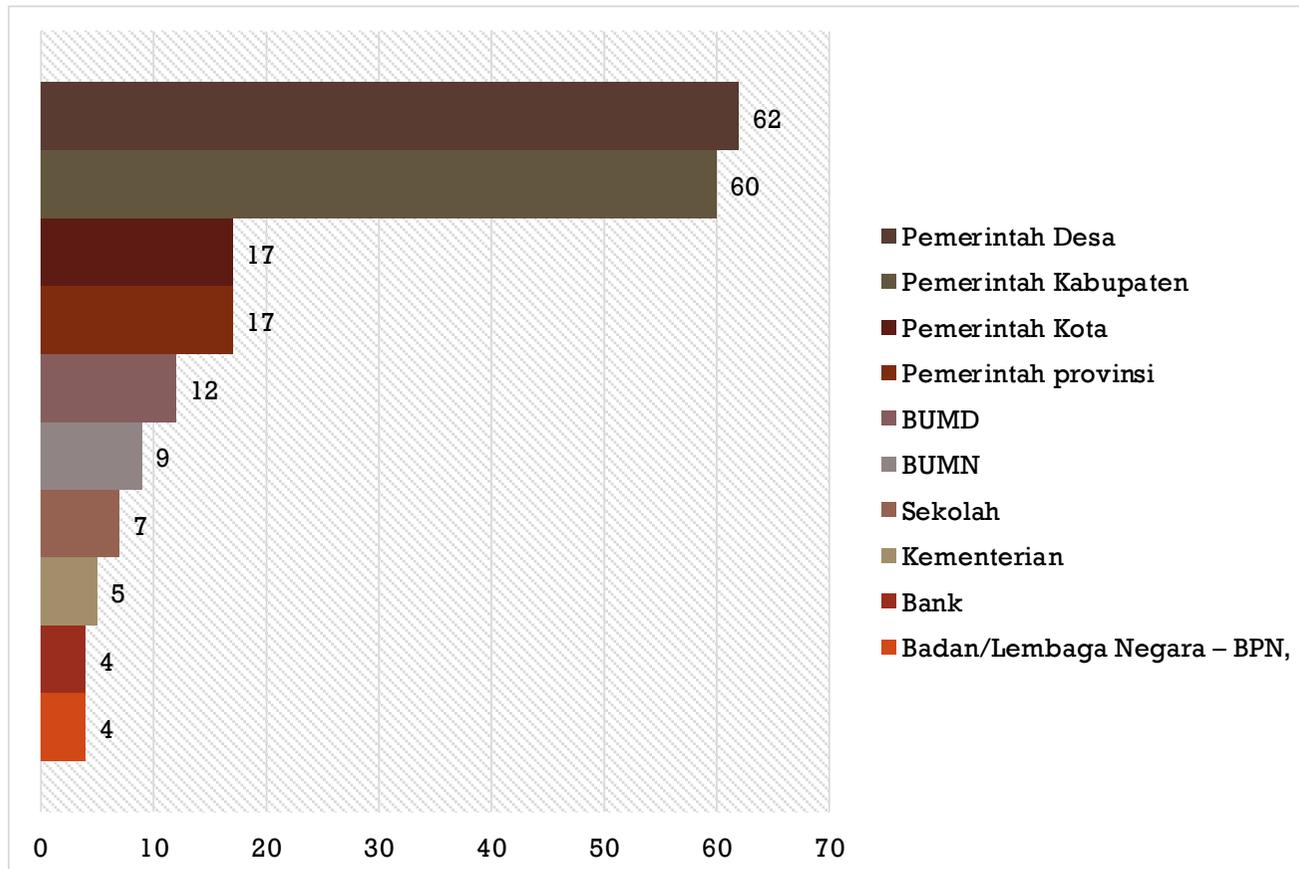
# PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN PROVINSI PADA SEMESTER I TAHUN 2021 (10 BESAR)



- Tercatat penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur;
- Di Provinsi Jawa Timur terdapat 79 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sepanjang semester I sebanyak 106 kasus. Namun realisasinya hanya ditemukan sebanyak 17 kasus. Artinya kinerja penindakan kasus korupsi pada institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur sangat buruk.
- Sedangkan di Provinsi NTT, terdapat 41 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target sepanjang semester I sebanyak 35 kasus, sama dengan Jatim, kasus yang berhasil disidik hanya 17 kasus. Bila dilihat secara kuantitas, kinerja aparat penegak hukum di NTT lebih baik ketimbang Jatim.
- Namun demikian, pada situs resmi institusi penegak hukum baik di Provinsi Jawa Timur maupun NTT, tidak ditemukan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- Hal ini menunjukkan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh institusi penegak hukum di daerah masih buruk, terutama terkait dengan anggaran penyidikan.



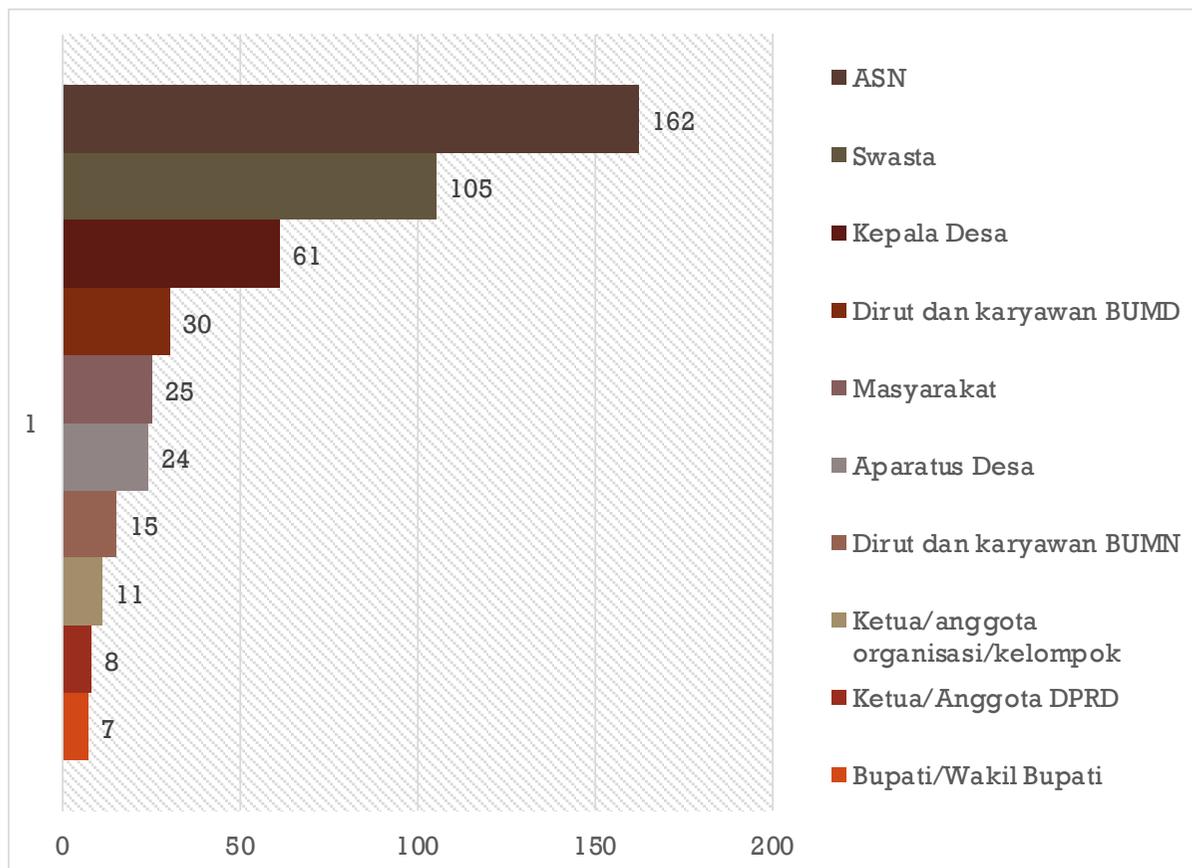
# PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN LEMBAGA PADA SEMESTER I TAHUN 2021 (TOP 10)



- Pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga yang paling banyak terjadi kasus korupsi;
- Kasus Korupsi yang melibatkan pemerintah desa mulai muncul dan trennya terus meningkat sejak Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk desa
- Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga menjadi lembaga yang rawan terjadi korupsi;
- Angka ini setidaknya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi



# PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN AKTOR SEMESTER I TAHUN 2021 (TOP 10)



- Aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah ASN, Swasta dan Kepala Desa.
- Berdasarkan hasil pantauan, kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swata terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa.
- Sementara itu, Kepala Desa merupakan aktor yang paling banyak ditangkap akibat melakukan penggelapan anggaran desa.
- Selama semester I, tercatat hanya ada 1 (satu) korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka
- Kelanjutan penanganan korporasi harus dituntaskan hingga tahap akhir.
- Terdapat 10 (sepuluh) Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi tersangka (1 Gubernur) (2 wali kota) (7 Bupati/Wakil)

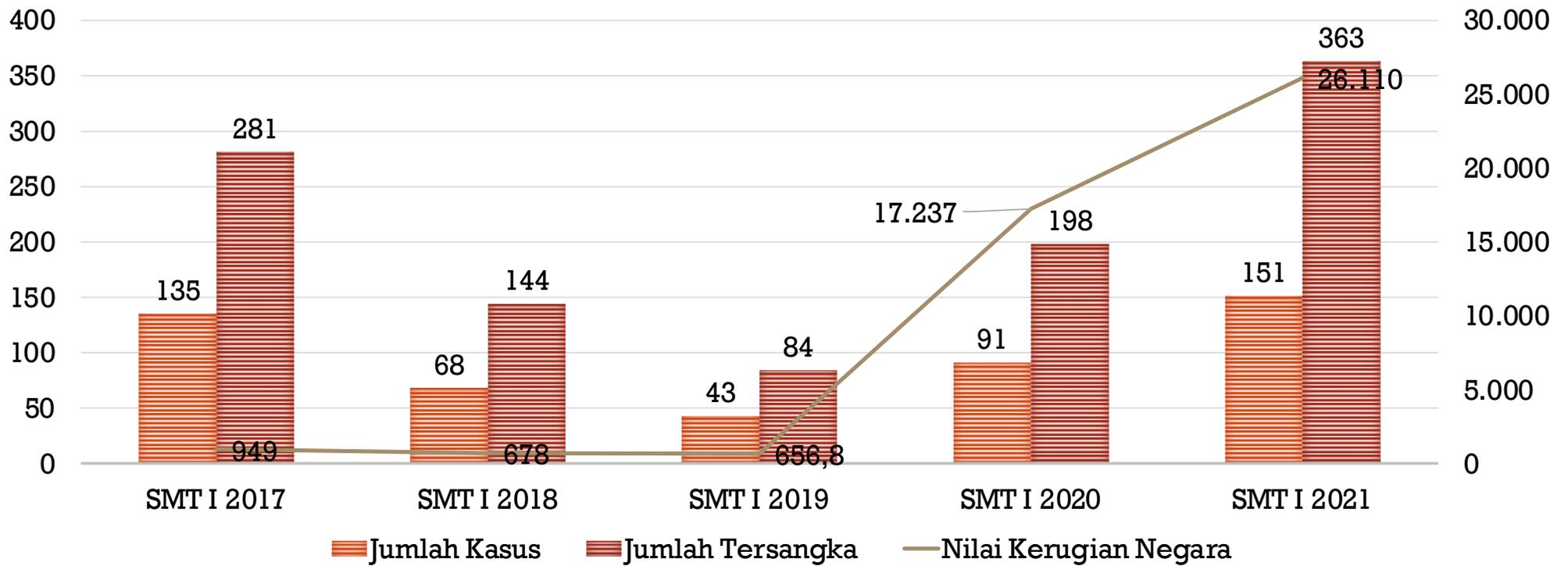


# KINERJA PENEGAK HUKUM SEMESTER I TAHUN 2021

			
	151 kasus	45 kasus	13 kasus
	363 tersangka	82 tersangka	37 tersangka
	Rp26,1 triliun	Rp388 miliar	Rp331 miliar



# KEJAKSAAN



## **Kuantitas Penanganan Kasus**

- Kejaksaan memiliki kantor sebanyak 532 kantor di seluruh Indonesia dengan target penanganan kasus selama semester I sebanyak 285 kasus. Anggaran yang dikelola sebesar Rp75,5 miliar;
- Kejaksaan sepanjang semester I tahun 2021 menangani sebanyak 151 kasus;
- Rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan per bulan adalah sekitar 25 kasus;
- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan sekitar 53 persen atau masuk dalam kategori **C atau Cukup**

## **Kualitas Penanganan Kasus**

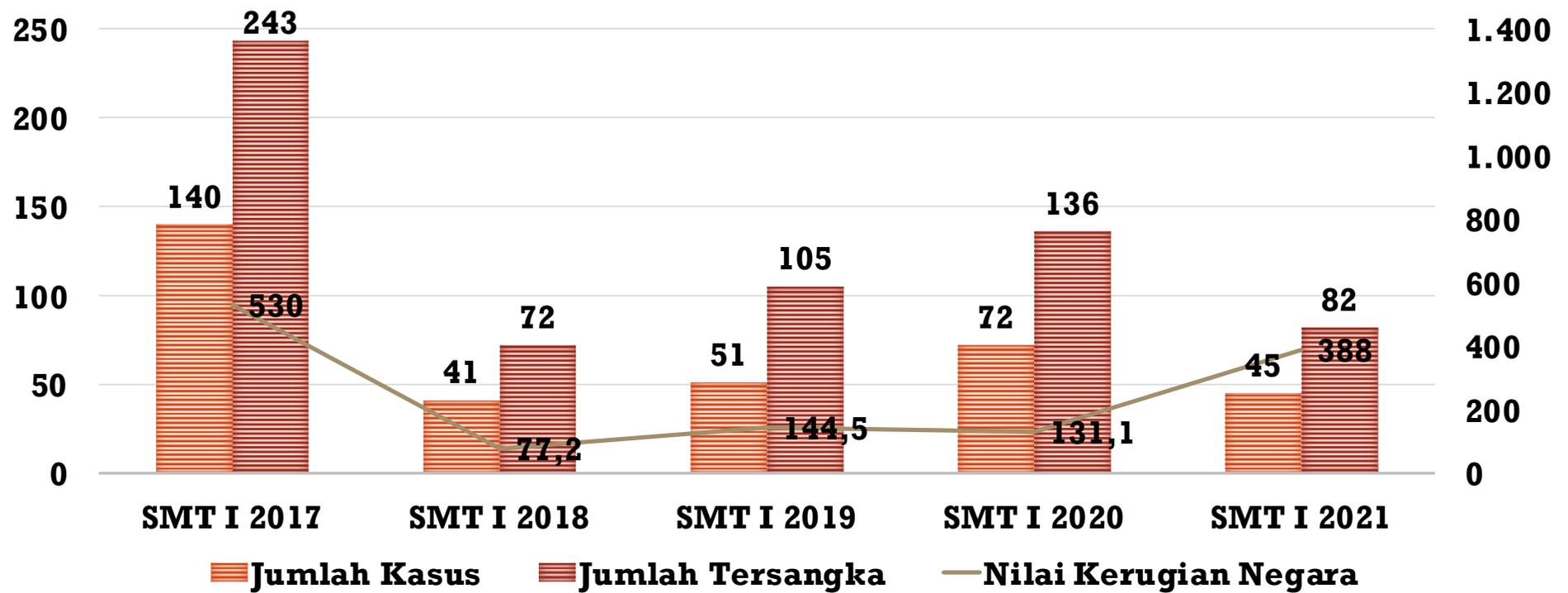
- Aktor yang banyak ditangani oleh Kejaksaan adalah ASN (124 tersangka), Swasta (77 tersangka) dan Kepala Desa (44 tersangka)
- Nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani oleh Kejaksaan menjadi yang terbesar selama semester I ketimbang instansi lainnya;
- Namun hal ini tidak dapat serta merta menjadi suatu pencapaian karena Kejaksaan harus memastikan bahwa nilai kerugian sebesar Rp. 26 Triliun harus kembali kepada kas negara.

## **Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi**

- Diduga terdapat sejumlah Kejaksaan yang tidak menangani kasus korupsi. Artinya, Kejaksaan Agung perlu melakukan evaluasi terhadap setiap Kejaksaan yang terbukti tidak bekerja.
- Dalam kinerjanya, Kejaksaan masih minim melakukan pengembangan kasus yang ditanganinya, salah satunya adalah kasus Jaksa Pinangki, Kejaksaan masih belum melakukan upaya untuk mengejar aktor lain yang terlibat dalam kasus tersebut.



# KEPOLISIAN





### **Kuantitas Penanganan Kasus**

- Penanganan kasus korupsi di Kepolisian menurun dibandingkan dengan semester I tahun – tahun sebelumnya
- Kepolisian memiliki 517 kantor. Target penanganan kasus korupsi selama semester I 2021 sebanyak 763 kasus dengan anggaran sebesar Rp290,6 miliar.
- Kepolisian dalam semester I 2021 hanya dapat menangani 45 kasus. Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar 5,9 persen atau masuk dalam kategori **E atau Sangat Buruk**
- Rata-rata kasusnya yang ditangani oleh Kepolisian per bulan sekitar 8 kasus

### **Kualitas Penanganan Kasus**

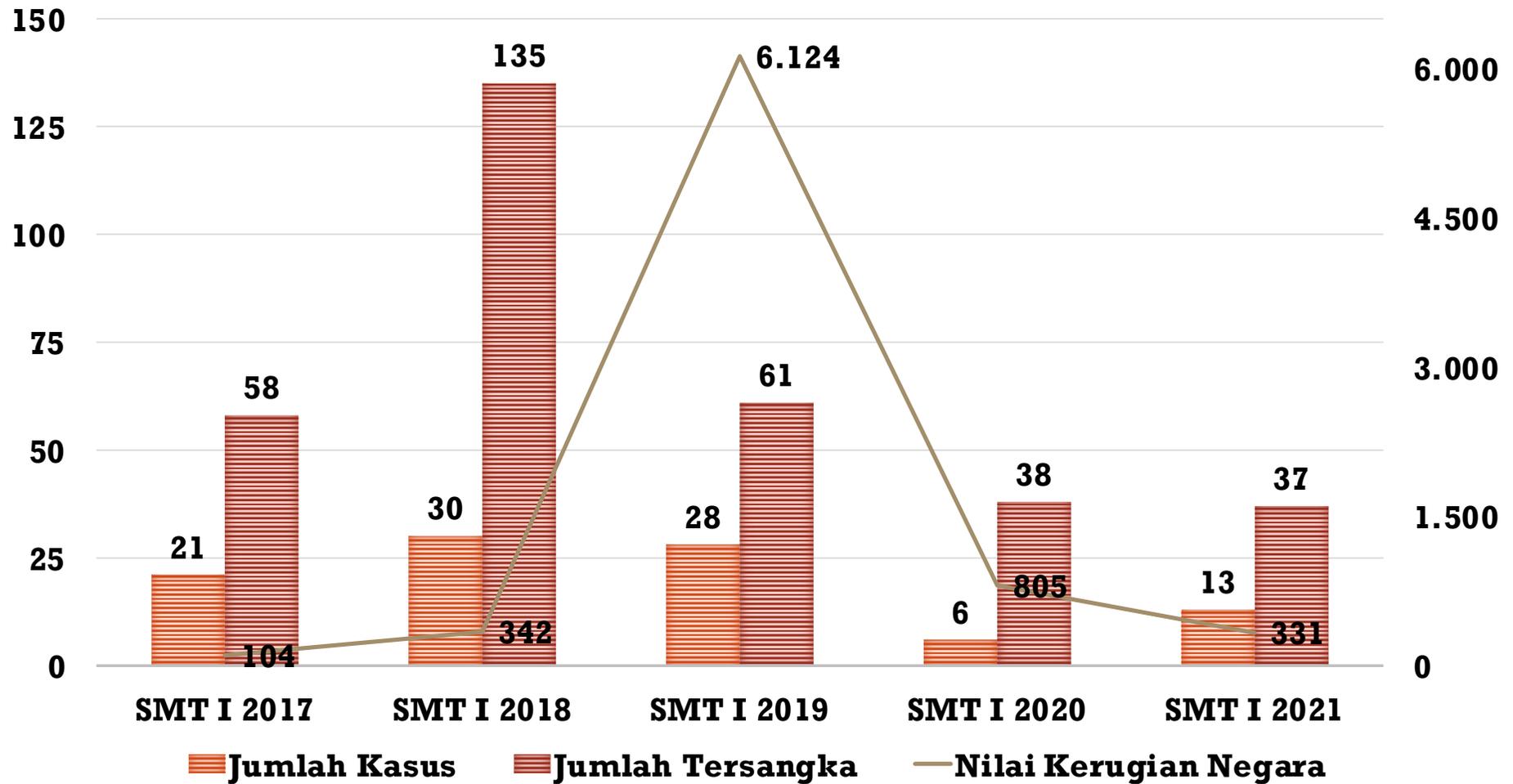
- Aktor yang banyak ditangani oleh Kepolisian adalah ASN (31 tersangka), Kepala Desa (17 tersangka) dan Swasta (14 tersangka);
- Tidak ada upaya dari Kepolisian untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.
- Selama semester I 2021, Kepolisian tidak sekalipun menggunakan instrument pasal pencucian uang;
- Hal ini tentu bertolak belakang dengan janji Kapolri Listyo Sigit yang pada saat *fit and proper test* menegaskan akan memaksimalkan pemulihan aset dalam kasus korupsi.

### **Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi**

- Dengan sumber daya yang melimpah dari segi anggaran ketimbang Kejaksaan dan KPK, kinerja Kepolisian justru lebih buruk;
- Selain itu tidak ditemukan adanya laporan penggunaan anggaran



# KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



### **Kuantitas Penanganan Kasus**

- KPK pada semester I 2021 mengalami peningkatan yang tidak signifikan dari segi jumlah kasus, namun menurun dari segi jumlah tersangka dan nilai kerugian negara;
- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 22 persen dari target sepanjang semester I sebanyak 60 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPK masuk dalam kategori **D atau Buruk**.
- Rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK per bulan yakni 3 kasus.

### **Kualitas Penanganan Kasus**

- Sebagian besar penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK merupakan hasil OTT (1 kasus) dan pengembangan kasus (3 kasus). Sedangkan kasus yang baru disidik pada semester I tahun 2021 hanya 9 kasus;

### **Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi**

- Berdasarkan informasi dari situs web KPK terdapat sebanyak 35 kegiatan penyidikan dan terdapat 32 penetapan tersangka Faktanya, sepanjang semester I 2021, ICW mencatat hanya 13 kasus yang disidik dengan tersangka sebanyak 37 orang.
- Perbedaan ini bisa terjadi akibat kebijakan komisioner KPK saat ini yang menggabungkan pengumuman penetapan tersangka dengan penahanan;
- Ditetapkan penyidik KPK yakni Stephanus Robin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Tanjung Balai, semakin mendegradasi integritas KPK di tengah situasi politik hukum anti korupsi saat ini.
- Untuk pertama kalinya, KPK memberikan SP3 untuk kasus mega korupsi BLBI
- KPK sangat pasif untuk melakukan upaya supervisi kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum lain, salah satu contohnya adalah respon KPK terhadap kasus korupsi PT. Asabri yang ditangani Kejaksaan



# DAMPAK TWK DALAM KINERJA KPK

- Penonaktifan 75 pegawai KPK mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2021;
- Dilihat dari kasus korupsi yang ditangani KPK selama semester I Tahun 2021, sebanyak 11 kasus korupsi ditangani sebelum tanggal penonaktifan, sedangkan 2 lainnya setelah tanggal tersebut (satu kasus diantaranya pengembangan kasus);
- Ini setidaknya menunjukkan bahwa TWK sangat berdampak dalam kinerja yang dilakukan oleh KPK selama semester I Tahun 2021;
- Dari 13 kasus tersebut, 5 diantaranya ditangani oleh penyidik yang dinonaktifkan
- Hal ini akan menghambat proses penegakan hukum dalam mengembangkan kasus;
- Lebih lanjut, dalam mengejar buronan kasus korupsi, kasatgas yang menangani kasusnya justru juga diberhentikan



# KESIMPULAN

- Pada semester I 2021, ICW menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh APH dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp26.830 Triliun;
- Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kejaksaan dan Kepolisian cenderung tertutup, sedang KPK cukup informatif;
- Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh APH mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus jumlah tersangka, dan nilai kerugian negara;
- Diduga terdapat penegak hukum di sejumlah daerah yang belum melakukan penindakan terhadap kasus korupsi;
- Sehingga kinerja APH pada semester I 2021 ini hanya mencapai sekitar 19 persen dan berada pada peringkat E atau Sangat Buruk
- Kategori kasus yang terpantau oleh ICW dalam semester ini: a) 188 kasus baru (89,6%), b) 17 pengembangan kasus (8,5%) dan 4 OTT (1,9%);
- Tercatat, institusi penegak hukum hanya dua kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang;
- Hanya 1 korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka



# KESIMPULAN

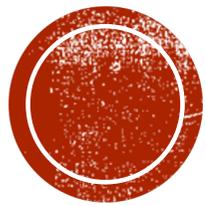
- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan cukup baik dalam aspek kuantitas. Sedangkan dalam aspek kualitas dan profesionalisme penanganan kasus masih banyak catatan.
- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sangat buruk dalam aspek kuantitas. Dalam aspek kualitas, aktor strategis jarang disasar dalam rangka pengembangan kasus.
- Kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus namun tidak secara signifikan, sedangkan dari jumlah tersangka dan nilai kerugian menurun;
- Dampak TWK setidaknya dapat terlihat dari buruknya kinerja KPK pada semester I Tahun 2021 setidaknya setelah tanggal 5 Mei 2021



# REKOMENDASI

- APH harus melaporkan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran untuk penyidikan kasus korupsi dan detail kasus yang masuk pada tahap penyidikan (deskripsi kasus, nama tersangka, nilai kerugian negara). Hal tersebut sejalan dengan mandat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Dalam sektor anggaran desa, pengelolaannya perlu diawasi secara serius mengingat pada tahun 2021 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 72 triliun;
- APH harus memaksimalkan penerapan pasal pencucian uang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara
- Pemerintah segera memprioritaskan agenda perampasan aset agar gagasan mengenai pemiskinan koruptor dan pengembalian kerugian negara dapat terealisasi;
- Laporan pemantauan ini diharapkan dapat menjadi catatan kritis bagi , Presiden sebagai Kepala Negara dan DPR yang memiliki fungsi pengawasan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dari setiap pimpinan institusi penegak hukum;
- Pemerintah perlu mempertimbangkan mengenai alokasi anggaran yang diberikan kepada institusi penegak hukum berdasarkan kinerja.





**TERIMA KASIH**

